

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
(BSPS) DI DESA MALIMBONG KECAMATAN MESSAWA KABUPATEN
MAMASA**

DEWI TASIK BONE

E011171325



**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2021



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

ABSTRAK

**Dewi Tasik Bone, Nomor Pokok E011171325, menyusun skripsi dengan judul :
“Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa
Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa” di bawah bimbingan Dr.
Muh Tang Abdullah, S. Sos., M. AP dan Drs. Nelman Edy, M. Si.**

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Adapun tujuan dari program BSPS ini adalah menanggulangi rumah yang tidak layak huni bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah (MBR) serta mendorong masyarakat untuk melakukan secara swadaya. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13/PRT/M/2016. Salah satu desa yang menerima bantuan BSPS ini yaitu Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat bagian: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa belum berjalan optimal walaupun program berhasil dilaksanakan, ini dikarenakan ada beberapa permasalahan yang dihadapi atau ditemukan selama proses pelaksanaan program ini yaitu sosialisasi kepada semua masyarakat yang harusnya diadakan dua kali tetapi hanya diadakan satu kali yaitu pada saat sosialisasi dengan penerima bantuan sehingga menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat desa karena tidak diadakan sosialisasi secara umum mengenai program ini, dan ini juga mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan tata cara pelaksanaan program ini. Peneliti juga melihat permasalahan lain yang terkait penyaluran bahan bangunan yang tidak merata dikarenakan kurangnya pengawasan dari TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan) dalam proses penyaluran bahan bangunan, ini juga diakibatkan karena kurangnya TFL yang disiapkan, sehingga dari permasalahan ini mengakibatkan ketidak merataan pembangunan dan keterlambatan dalam waktu penyelesaian pembangunan. Serta ditemukan juga permasalahan pada proses pencairan dana yang sangat berbelit-belit sehingga pencairan dananya terlambat. Begitupun dengan proses koordinasi antara para pelaksana yang terhalang Covid-19 sehingga menitik beratkan semua tugas dan tanggung jawab kepada TFL.

Kata Kunci: Implementasi, Program, BSPS, Masyarakat Berpenghasilan Rendah



**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

ABSTRACT

Dewi Tasik Bone, Main Number E011171325, compiled a thesis with the title: "Implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in Malimbong Village, Messawa District, Mamasa Regency" under the guidance of Dr. Muh Tang Abdullah, S. Sos., M. AP and Drs. Nelman Edy, M. Si.

The Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) is a program issued by the central government through the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The purpose of the BSPS program is to overcome uninhabitable houses for people with low income (MBR) and to encourage people to do so independently. The Self-Help Housing Stimulant Assistance Program is regulated in Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing No. 13 / PRT / M / 2016. One of the villages that received BSPS assistance was Malimbong Village, Messawa District, Mamasa Regency, West Sulawesi.

This study aims to determine the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in Malimbong Village, Messawa District, Mamasa Regency. The theory used in this study consists of four parts: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The research method used is descriptive method with a qualitative approach, and uses data collection methods through observation, interviews, documentation.

The results of this study indicate that the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in Malimbong Village, Messawa District, Mamasa Regency has not run optimally even though the program was successfully implemented, this is because there are several problems faced or discovered during the process of implementing this program, namely socialization to all people who should be. It was held twice but only once, namely at the time of outreach with beneficiaries, causing confusion among the village community because there was no general socialization about this program, and this also resulted in a lack of community understanding of the terms and procedures for implementing this program. Researchers also saw other problems related to the distribution of building materials that were not evenly distributed due to the lack of supervision from TFL (Field Facilitators) in the process of distributing building materials, this was also due to the lack of TFL being prepared, so this problem resulted in uneven development and delays in time. completion of development. Also found were problems in the process of disbursing funds which was very convoluted so that the disbursement of funds was late. Likewise with the coordination process between the implementers who were hindered by Covid-19 so that they focused all duties and responsibilities on TFL.

Keywords: Implementation, Program, BSPS, Low-Income Communities



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Tasik Bone
NIM : E011171325
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang : S1

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa" Adalah benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 29 Mei 2021

Yang menyatakan



Dewi Tasik Bone
E011171325



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dewi Tasik Bone
NIM : E011171325
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : "Impelemntasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa"

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim penguji skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 29 Mei 2021

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Muh Tang Abdullah, S. Sos., M. AP


Drs. Nelman Edy, M. Si.

NIP 19720507 200212 1 001

NIP 19610717 196702 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik


Dr. Nurul Naza, M. Si

NIP 19530903 198903 1 002



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dewi Tasik Bone
NIM : E011171325
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa"

Telah dipertahankan dihadapan sidang penguji skripsi program sarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis Tanggal 27 Mei 2021

Makassar, 29 Mei 2021

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Dr. Muh Tang Abdullah, S. Sos., M. AP (.....)

Sekretaris Sidang : Drs. Nelman Edy, M. Si (.....)

Anggota : 1. Dr. Suryadi Lambali, MA (.....)

2. Adnan Nasution, S. Sos., M. Si (.....)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua.

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia yang diberikan-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa**” tepat pada waktunya dan skripsi ini merupakan tugas akhir dari segala kegiatan studi.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit halangan dan rintangan yang dihadapi, namun dengan adanya bantuan dari beberapa pihak sehingga penelitian ini dapat selesai tepat waktu. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak terutama untuk orang tua yaitu Bunda tersayang **Kristina Kaya'** dan untuk Ayah tercinta **Dominggus** yang telah mendidik dan berkorban banyak hal dalam mendampingi penulis hingga dapat menyelesaikan studi dengan baik, buat kaka tersayang **Daniel Dominggus** dan adik tercinta **Setiawati Dominggus** yang selalu memberi dukungan/semangat dan bantuan bagi penulis selama perkuliahan dan juga buat keluarga dan teman-teman yang senantiasa ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi mereka serta memberikan umur panjang, sehat selalu dan bahagia dalam sepanjang kehidupan mereka, amin.

Dalam menyusun skripsi ini tidak akan mungkin terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, untuk itu ijinakan saya haturkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya untuk:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta seluruh stafnya.
2. **Prof. Dr. Armin, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. **Dr. Nurdin Nara, M. Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi
4. **Dr. Muh Tang Abdullah. M. AP** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi sekaligus menjadi pembimbing 1 yang telah memberikan banyak masukan serta saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. **Drs. Nelman Edy, M. Si** sebagai penasehat Akademik dan sekaligus menjadi pembimbing 2 yang telah memberikan banyak masukan serta saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. **Dr. Suryadi Lambali, MA** selaku penguji I yang telah memberikan banyak masukan serta saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
7. **Adnan Nasution, S. Sos., M. Si** selaku penguji II yang telah memberikan banyak masukan serta saran dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu Dosen Departemen Ilmu Administasi yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama dibangku kuliah.
9. Seluruh staf akademik fakultas dan pegawai Departemen Ilmu Administrasi (**Ibu Rosmina, Ibu Darma, Pak Lili**) yang telah berjasa dan atas kontribusinya yang tak terlepas bagi segenap mahasiswa Departemen Ilmu Adminstrasi.
10. Kepada semua pihak yang terlibat dalam Program BSPS di Desa Malimbong baik itu Kordinator Fasilitator, Tenaga Fasilitator Lapangan, Aparat Desa malimbong, toko masyarakat, masyarakat penerima bantuan bahkan sampai masyarakat umum dan khususnya bagi narasumber yang telah responsif membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

11. **Kepada Bapak Yulianus** selaku kepala Desa Malimbong beserta stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. **Zakaria Duma S.Sos**, selaku pengawas yang telah banyak menyumbangkan tenaga, pikiran dalam membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. **Kepada Yudin Sesa Malolo** selaku parnert yang selalu membantu penulis ketika menghadapi masalah selama perkuliahan. Dan yang juga telah banyak menyumbangkan tenaga bahkan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
14. **Kepada Ibu Nurliati, Marta, Leri dan Bapak Daniel Dominggus** yang telah membantu peneliti dalam mencari data-data selama penelitian.
15. Kepada sahabat-sahabat ku, **Nur Wulandari, Nismawati, dan An'nisa Fitri** yang menemani selama penulis berada di bangku kuliah, terima kasih atas kesediaan, ketulusan sebagai teman selalu mendengar setiap keluhan, selalu menemani dikalah susa dan senang, sebagai teman yang tidak pernah mengeluh ketika saya meminta bantuan dan juga yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Kepada **Elena dan Indah** yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
17. Kepada teman-teman **Leader 2017** yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih telah membantu penulis selama proses perkulihan, memberikan masukan, dan menemani penulis dalam menghadapi masalah-masalah yang ada selama proses perkuliahan, dan sukses untuk saudara ku semua.
18. Kepada **HUMANIS FISIP UNHAS, PMKO FISIP UNHAS, DB'3 VOICE FISIP UNHAS**. Terima kasih atas pengalam dan pengetahuan berorganisasi yang telah diberikan selama ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis untuk kedepannya.

19. Serta teman-teman Penulis tanpa terkecuali, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini. Serta semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak sempat penulis sebutkan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Sekian dan terima kasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Dan Salam Sejahterah Bagi Kita Semua, Tuhan Yesus Memberkati.

Makassar, 29 Mei 2021

(penulis)

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG	1
I.2 Rumusan Masalah	13
I.3 Tujuan Penelitian	13
I.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
II.1 Landasan Teori	15
II.1.1 Kebijakan Publik	15
II.1.2 Implementasi Kebijakan	23
II.1.3 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik	27
II.1.4 Program	38
II.1.5 Defenisi Rumah	42
II.1.6 Deskripsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	47
II.1.7 Penelitian Terdahulu	50
II.2 Kerangka Pikir	54
BAB III	57
METODE PENELITIAN	57
III.1 Jenis Penelitian	57
III.2 Fokus Penelitian	57
III.3 Lokasi Penelitian	58
III.4 Narasumber atau Informan	58
III.5 Teknik Pengumpulan Data	59

III.6 Analisis Data	60
BAB IV	62
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	62
IV.1. Deskripsi Desa Malimbong	62
IV.2 Kondisi Geografis.....	62
IV.3 Kependudukan.....	63
IV.4 Sosial.....	63
IV.5 Visi Misi Desa Malimbong	63
IV.6 Struktur Organisasi Desa Malimbong.....	64
BAB V	66
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	66
V.1 Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa.....	66
V.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa	70
V.2.1 Komunikasi.....	70
V.2.2 Sumber Daya	75
V.2.3 Disposisi.....	82
V.2.4 Struktur Birokrasi	84
BAB VI	88
PENUTUP	88
VI.1 Kesimpulan	88
VI.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2019-Maret 2020	7
Tabel I. 2 Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Daerah, Maret 2019-Maret 2020	8
Tabel I. 3 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mamasa, 2012-2019.....	9
Tabel I. 4 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Mamasa, 2012-2019.....	10
Tabel III. 1 Daftar Informan	58
Tabel V. 1 Realisasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di desa malimbong kecamatan messawa kabupaten mamasa 2019-2020	67
Tabel V. 2Jumlah Rumah Yang mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten mamasa Tahun 2020 berdasarkan pembagian kelompok.....	68
Tabel V. 3 Sumber Anggaran Program BSPS di Kabupaten Mamasa tahun 2020	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Tiga elemen sistem kebijakan	22
Gambar II. 2 seukensi implementasi kebijakan	25
Gambar II. 3 Model Implementasi Meter dan Horn.....	30
Gambar II. 4 Model and Indirect of Implementation.....	33
Gambar II. 5 Kerangka Berfikir.....	56
Gambar III. 1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif	61
gambar IV. 1 Peta Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa	63
gambar IV. 2 Struktur organisasi Pemerintah Desa Malimbong	64

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan adalah sebagai proses multidimensi yang mencakup perubahan orientasi dan organisasi sistem sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Proses peningkatan kualitas hidup difokuskan kepada peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menciptakan gagasan-gagasan konstruktif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam membentuk dan menciptakan sumber daya manusia yang produktif, maka pembangunan sangat penting untuk dilakukan. Dimana pembangunan beresensi adanya perubahan yang diharapkan terjadi dalam dimensi kehidupan di masyarakat. Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat tentunya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup mereka. Namun tidak semuanya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi yang kurang baik, seperti kondisi kemiskinan. Dimana kemiskinan itu muncul dari adanya implikasi kesenjangan- kesenjangan sosial. Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti anak terlantar, pengemis, gelandangan, masyarakat yang tidak memiliki rumah yang layak untuk dihuni, tunasusila, pengangguran, kejahatan, tingkat kesehatan rendah, kurangnya pendidikan dan lain-lain. Ini merupakan kondisi yang masih dirasakan atau sedang di hadapi bangsa Indonesia sebagai negara berkembang. Dimana kemiskinan ini selalu menjadi hambatan atau masalah dalam misi untuk mewujudkan kehidupanyang sejahterah seperti yang diinginkan oleh setiap negara khususnya negara Indonesia.

Kemiskinan adalah kondisi yang mengganggu kesejahteraan hidup setiap masyarakat, seperti yang kita ketahui kemiskinan bisa berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan psikis, fisik, spritual dan sosial. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak tetap, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki setiap orang, kurangnya pendidikan, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya yaitu tempat tinggal (rumah) yang tentunya disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kriteria rumah yang layak huni dikarenakan kondisi ekonomi yang tidak baik atau tidak stabil. Dimana rumah merupakan hal yang sangat penting dan menjadi pokok bagi setiap masyarakat karena rumah memiliki fungsi sebagai tempat untuk berlindung, selain itu rumah juga sebagai tempat tinggal maka dari itu rumah harus aman dan nyaman ketika ditempati. Rumah yang layak untuk ditempati adalah rumah yang bersih dan memenuhi kriteria rumah yang sehat. Terpenuhinya kebutuhan dasar rumah yang layak huni diharapkan mampu meningkatkan ketahanan hidup masyarakat dan kesehatan hidup masyarakat. Maka dari itu untuk pemerintah sangat diperlukan adanya pembagunan rumah yang layak huni guna menunjang masyarakat dalam mendapatkan rumah yang layak untuk ditempati khususnya bagi mereka yang kurang mampu atau bagi mereka yang kekurangan ekonomi.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh (BPS) Badan Pusat Statistik tahun 2020 yaitu presentase penduduk miskin di Indonesia pada maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap september 2019 dan meninggkat 0,37 persen poin terhadap poin maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap september 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap maret 2019. Presentase

penduduk miskin di daerah perkotaan pada september 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada september 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada maret 2020 dan jika dibandingkan dengan september 2019, jumlah penduduk miskin maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada september 2019 menjadi 11,16 juta orang pada maret 2020). Sementara di daerah pedesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada september 2019 menjadi 15,26 juta orang pada maret 2020). Garis kemiskinan di Indonesia pada maret 2020 tercatat sebesar Rp.454.652,-/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp.335.793,- (73,86 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp.118.859,- (26,14 persen). Dan pada maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp.2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan. Dengan melihat data-data diatas bahwa masih banyak dan bahkan terus bertambahnya penduduk miskin di Indonesia maka perlu adanya tindak lanjut atau penanganan serius. Dan diharapkan adanya keterlibatan dari semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha (swasta) dan masyarakat.

Pada tahun 2020 pemerintah Indonesia kembali menjalankan program BSPS sebagai upaya dalam mengurangi rumah yang tidak layak huni di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah, sekaligus mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah. Tentunya dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman. Terutama pada

tahun 2020 ini sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh dunia diperhadapkan dengan adanya pandemi COVID-19 terutama negara Indonesia maka dari itu tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 ini meningkat pesat. Dengan adanya program BSPS yang dilakukan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) guna memitigasi dampak Covid-19 seperti mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran akibat pandemi Covid-19.

Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2 yang berbunyi (1) fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Maka dari itu, setiap warga negara Indonesia berhak memiliki tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, sebagaimana kita ketahui rumah merupakan salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia. Dan rumah merupakan suatu kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan martabat, harkat, pengidupan dan kehidupan dan sebagai upaya peningkatan taraf hidup setiap warga masyarakat untuk membantu mewujudkan pembentukan karakter dan kepribadian bangsa karena rumah memiliki fungsi yang besar bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, seperti tempat pendidikan awal bagi anak-anak dan lain sebagainya.

Oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan telah membuat program-program yang berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan, dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan. Beberapa

program yang dibuat pemerintah sebagai upaya dalam mengurangi kemiskinan diantaranya yaitu PKH (Program Keluarga Harapan), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dalam tingkat pendidikan diantaranya KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan masih banyak lagi, serta pemerintah juga membuat Program bantuan rumah, yaitu RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dan ada juga program BSPS (Bantuan stimulan Perumahan Swadaya). Kedua Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni. Program bantuan ini ditujukan untuk rumah tangga miskin yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk dihuni. Dengan maksud untuk dapat meningkatkan taraf hidup semua warga Negara Indonesia agar memiliki hunian yang memenuhi standar atau kewajaran.

Program BSPS ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi juga bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin agar lebih menyadari betapa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dan aspek sosial dalam lingkungan keluarga serta bagaimana membangun rasa kesetiakawanan dan semangat gotong-royong di dalam masyarakat. Karena kita ketahui bersama rasa kesetiakawanan dan gotong-royong ini suda mulai pudar dan tentunya diharapkan juga dengan adanya program ini dapat membantu meringankan kesulitan keluarga miskin untuk memiliki rumah yang layak huni.

Dari sekian provinsi yang ada di Indonesia Provinsi Sulawesi Barat juga masuk sebagai penerima Bantuan Program BSPS. Sebagaimana diketahui di provinsi ini masih terdapat banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah yang layak huni, dikarena faktor kemiskinan dan kurangnya keterampilan, bahkan kurangnya pengetahuan masyarakat setempat akan pentingnya memiliki rumah yang layak untuk di huni.

Di Sulawesi Barat sendiri terdapat jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebanyak 151,40 ribu jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya 151,78 ribu jiwa terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,38 ribu jiwa. Adapun kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di tahun 2019 adalah Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 68,86 ribu jiwa, sedangkan kabupaten dengan jumlah yang paling sedikit adalah Kabupaten Pasangkayu sebanyak 7,42 ribu jiwa. Ini karenakan jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menjadi sebanyak 1. 380,66 ribu jiwa. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Sul- Bar adalah Polewali Mandar sebanyak 442,58 ribu jiwa, sedangkan Kabupaten dengan jumlah penduduk terkecil adalah Mamuju Tengah sebanyak 134,03 ribu jiwa. Laju pertumbuhan PDRB seri 2010 di Sul-Bar pada tahun 2019 sebesar 5,66 persen. Kabupaten dengan laju pertumbuhan PDRB tertinggi pada tahun 2019 adalah Polewali Mandar sebesar 6,17 persen, sedangkan kabupaten dengan laju pertumbuhan PDRB terendah pada tahun 2019 adalah Pasangkayu sebesar 5,23 persen.

Berikut beberapa Tabel dan pembahasan mengenai jumlah kemiskinan yang ada di provinsi Sulawesi Barat:

Tabel I. 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2019-Maret 2020

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2019	31,28	9,63
September 2019	30,82	9,41
Maret 2020	31,67	9,59
Pedesaan		
Maret 2019	120,12	11,45
September 2019	121,05	11,43
Maret 2020	202,34	11,26
Perkotaan + Pedesaan		
Maret 2019	151,40	11,02
September 2019	151,87	10,95
Maret 2020	152,02	10,87

(Sumber: Data dari BPS/BRS Profil Kemiskinan Maret 2020 Di Provinsi Sulawesi barat)

Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada Maret 2020 sebesar 10,87 persen atau menurun 0,08 persen poin dibandingkan september 2019 dan menurun 0,15 persen poin dibandingkan maret 2019. Secara absolute jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Maret 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,15 ribu jiwa jika dibandingkan september 2019 dan mengalami peningkatan sebesar 0,62 ribu jiwa jika dibandingkan maret 2019. Peningkatan penduduk miskin 2020 ini terjadi daerah perkotaan, sebesar 0,85 ribujiwa bila dibandingkan september 2019 dan 0,39 ribu jiwa bila dibandingkan dengan maret 2019. Sementara di daerah pedesaan pada maret 2020 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,71 ribu jiwa bila dibandingkan september 2019. Sebaliknya jika dibandingkan selama setahun (maret 2019),

terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 0,52 ribu jiwa. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah penduduk secara umum di daerah perkotaan.

Gambaran penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada September 2019 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. Selama periode september 2019 sampai maret 2020 terjadi inflasi sebesar 2,44 persen.
- b. Terjadinya inflasi umum ini menandakan bahwa daya beli masyarakat secara umum cukup tinggi sehingga harga barang dan jasa pada maret 2020 meningkat dibandingkan pada september 2019.
- c. Terjadi deflasi pada komoditas barang dan jasa kelompok pengeluaran transportasi dan kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya.
- d. Nilai tukar petani Sulawesi Barat pada maret 2020 sebesar 110,42, meningkat sebesar 6,06 persen jika dibandingkan NTP september yang sebesar 104,11. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan petani pada umumnya meningkat.

Tabel I. 2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Daerah, Maret 2019-Maret 2020

Tahun	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman kemiskinan (P1)			
Maret 2019	1,32	1,88	1,75
September 2019	1,65	1,37	1,44
Maret 2020	1,93	1,87	1,89
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2019	0,26	0,47	0,42
September 2019	0,33	0,28	0,29
Maret 2020	0,53	0,47	0,48

(Sumber: Data BPS/BRS Profil Kemiskinan Maret 2020 di Provinsi Sul-Bar)

Peningkatan P1 maupun P2 terjadi terutama disebabkan peningkatan P1 dan P2 yang cukup signifikan baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan pada maret 2020. P1 di perkotaan meningkat 0,29 poin dibandingkan september 2019 dan meningkat 0,61 poin jika dibandingkan maret 2019. Sedangkan P2 di perkotaan meningkat 0,20 poin dibandingkan september 2019 dan meningkat 0,26 poin jika dibandingkan maret 2019. Sementara itu di daerah pedesaan, P1 juga mengalami peningkatan 0,50 poin pada maret 2020 jika dibandingkan september 2019 tetapi menurun 0,01 poin dibandingkan september 2019 dan cenderung tetap jika dibandingkan maret 2019. Fenomena P1 dan P2 antara kurun waktu september 2019-maret 2020 yang terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di daerah cenderung semakin menjauhi GK dan Ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin melebar.

Berikut beberapa Tabel dan pembahasan mengenai jumlah kemiskinan yang ada di provinsi Sulawesi Barat khususnya di Kabupaten Mamasa:

Tabel I. 3 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mamasa, 2012-2019

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapital/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2012	186 532	21,00	14,38
2013	197 930	20,60	13,92
2014	207 126	21,10	12,82
2015	213 369	22,58	14,71
2016	226 202	21,43	13,90
2017	239 112	21,14	13,51
2018	249 103	21,22	13,38
2019	256 544	21,64	13,42

(Sumber: Data BPS/Kabupaten Mamasa Dalam Angka 2020)

Tabel I. 4 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Mamasa, 2012-2019

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
(1)	(2)	(3)
2012	2,13	0,47
2013	1,98	0,58
2014	2,96	1,11
2015	1,56	0,31
2016	1,86	0,38
2017	2,19	0,51
2018	2,24	0,60
2019	2,19	0,50

(Sumber: Data BPS/Kabupaten Mamasa Dalam Angka 2020)

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan bedah rumah yang salah satunya di Provinsi Sulawesi Barat (SULBAR) . Pada tahun 2020, anggaran BSPS dialokasikan sebesar Rp 4,35 triliun untuk peningkatan kualitas 208.000 unit RTLH dan membangun baru 12.000 Unit RTLH senilai Rp 459 miliar. Di Provinsi Sulawesi Barat sendiri disalurkan sebanyak 3.500 unit yang terbagi dalam dalam 2 tahap, yakni tahap 1 sebanyak 2.500 unit dan tahap 2 sebanyak 1.000 unit. Total anggaran untuk program ini yaitu, tahap pertama sebesar Rp.43,75 miliar dan untuk tahap kedua sebesar Rp.17,5 miliar. Pembangunan bedah rumah tahap pertama tersebar di sejumlah lokasi seperti di Kabupaten Mamasa (300 unit), Kabupaten Mamuju (350 unit), Kabupaten Mamuju Tengah (500 unit), Kabupaten Pasangkayu (450 unit), Kabupaten Polewali Mandar (300 unit) dan Kabupaten Majene (600 unit). Peningkatan kualitas hunian dilakukan dengan memperhatikan syarat rumah layak huni yakni keselamatan bangunan dengan peningkatan kualitas konstruksi bangunan, kesehatan penghuni dengan memenuhi standar kecukupan cahaya

dan sirkulasi udara serta ketersediaan MCK dan kecukupan minimum luas bangunan dengan pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang.

Jumlah rumah yang akan mendapatkan program BSPS di Kabupaten Mamasa tahun 2019-2020 dibagi dua tahap, tahap pertama berjumlah 300 unit dan untuk tahap kedua berjumlah 400 unit, jadi total bantuan Program BSPS di Kabupaten Mamasa berjumlah 700 unit.

Di Kabupaten Mamasa khususnya di Desa Malimbong Kecamatan Messawa terdapat 60 unit rumah yang akan di rehab maupun bangun baru. Di Desa Malimbong sendiri pembangunan dibagi menjadi 4 kelompok yaitu Malimbong 3, Malimbong 4 Malimbong 5 dan Malimbong 6. Sementara untuk Malimbong 1 dan 2 telah mendapatkan program bantuan rumah tidak layak huni ini pada tahun 2018 berjumlah 20 unit rumah.

Dalam pelaksanaan program BSPS di Desa Malimbong ini belum berjalan optimal. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan beberapa yang bertanggung jawab di dalamnya serta dengan 3 orang masyarakat penerima bantuan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa dalam pelaksanaannya masih di temukan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan program BSPS ini.

Masalah yang pertama: yaitu proses pencairan dana belum memiliki kapasitas waktu yang jelas dan proses penyalurannya terlalu berbelit-belit, seperti yang dirasakan seorang penanggung jawab program ini, dimana dana yang dicairkan harus melalui prosedur yang panjang, sementara program ini harusnya sudah berjalan. Dan bahkan pada saat program sudah dimulai dananya belum juga dicairkan.

Masalah yang kedua yaitu: proses pengadaan barang tidak merata. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang penerima bantuan BSPS yaitu Tuan Bakhri

Bera, mengatakan bahwa kendala yang dia hadapi dalam proses pembangunannya yaitu barang yang diperlukan belum tersedia sementara sudah seharusnya pembangunan di mulai, dan dia mengatakan bahwa ada beberapa rumah yang sudah mencapai 50% bahkan ada yang hampir mencapai tahap akhir sementara masih ada masyarakat lain yang masih di tahap 20% bahkan belum memulai pembangunan karena terkendala pada perlengkapan untuk pembangunan.

Masalah ketiga: yaitu masih terkendalanya pelaksanaan program BSPS yang kurang sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan. Seperti batas waktu pelaksanaan Program BSPS, dimana telah ditetapkan batas waktunya yaitu 2 bulan untuk pembagunan fisik, namun pada kenyataannya waktu pelaksanaan BSPS ini melebihi dari waktu yang telah ditetapkan. Seperti yang dikatakan salah satu kordinator dari program ini, bahwa pembangunan seharusnya sudah 50% ketika memasuki bulan kedua tetapi nyatanya masih ada masyarakat yang tahap pembangunannya masih 15%, dan ini membuat kordinator pusing bagaimana akan melaporkan setiap kegiatannya sementara setiap minggu harus ada perkembangan pembangunan yang dilaporkan tapi masih ada masyarakat yang acuh tak acuh dalam membangun.

Masalah keempat yaitu: sosialisasi mengenai program ini belum berjalan optimal. Dimana masih ada masyarakat yang tidak tau menau adanya program ini di desanya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan (hanya orang-orang yang mempunyai keluarga yang berwenang dalam program ini, yang bisa mendapatkan BSPS).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus peneliti adalah mengenai **“Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa?”

I.3 Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, peneliti harus menentukan tujuan yang ingin dicapai sebab tanpa adanya tujuan yang jelas maka seorang peneliti akan mengalami kesulitan. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat.

I.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan di Desa Malimbong Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa penulis berharap dapat memberimanfaat sebagai berikut :

1) Manfaat secara akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dan pembaca tentang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, juga dapat dijadikan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dengan bidang yang sama.

2) Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran atau alternatif lain untuk melakukan pembenahan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini.

Dan juga penelitian diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Khususnya Desa Malimbong dalam melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sehingga tercapainya program yang terimplementasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Landasan Teori

Landasan teori disini akan menjelaskan beberapa konsep yang telah diklarifikasikan oleh peneliti .Dalam landasan teori penelitian ini, peneliti menguraikan teori ke dalam beberapa teori yakni, Teori Kebijakan Publik, Teori Implementasi Kebijakan Publik, Program (Pengertian dan Tahapan-tahapan Implementasi program). Kemudian penjelasan mengenai Definisi Rumah, dan Deskripsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Serta menjelaskan penelitian sebelumnya tentang program BSPS ini.

II.1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat (tool) keberadaan kebijakan publik sangat penting dan sekaligus krusial. Penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah persyaratan atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Krusial karena sebuah kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan isinya juga berkualitas, namun tidak otomatis bisa dilaksanakan kemudian menghasilkan sesuai yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya. Juga krusial karena sebuah kebijakan bisa - dan seringkali terjadi diperlakukan seolah lebih penting atau sejajar dengan tujuan yang hendak dicapai, padahal ia hanyalah sekedar alat, meskipun alat yang sangat penting.

Dalam pelaksanaan kegiatan dari suatu pemerintahan, maka diperlukan sebuah program yang mampu diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Kegiatan tersebut dapat menghasilkan sebuah gagasan yang kemudian menjadi sebuah program yang dapat dilaksanakan oleh para stakeholder. Pada akhirnya program itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan kegiatan tersebut adalah kebijakan publik. Kebijakan publik, tidak serta merta dapat diimplementasikan langsung. Tentu harus ada rumusan-rumusan gagasan yang kemudian diformulasikan ke dalam suatu tindakan (program). Karena di dalam perumusan tersebut, setiap orang atau sekelompok orang yang ada di dalam pemerintahan memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda mengenai kebijakan publik. Begitu pula ketika kebijakan publik dapat dilaksanakan, juga tergantung kepada orang atau sekelompok orang yang memahami kebijakan tersebut.

Ada dua buah kata yang sering digunakan dalam berbagai kesempatan dan untuk berbagai tujuan. Kedua kata itu seolah-olah memiliki makna yang sama karena akar kata tersebut memang sama, hanya akhirnya yang berbeda. Yang pertama adalah kata kebijaksanaan yang sering dipersamakan maknanya dengan kata wisdom dalam bahasa Inggris, dimana Undang-undang Dasar 1945 dan khususnya Pancasila juga menggunakan kata ini yaitu dalam sila keempat. Kata yang kedua adalah kata kebijakan (policy), dimana dalam berbagai literatur ilmu sosial kata ini sering digunakan dan sepertinya sudah baku dengan disertai embel-embel di belakangnya berupa kata publik atau negara. Dalam realitas keseharian, suatu ketika kita pernah meminta sebuah kebijaksanaan (wisdom) dari

seseorang atau sekelompok orang ketika menghadapi sebuah persoalan dan berharap hadirnya sebuah pemecahan atau solusi, baik berupa nasihat atau kata-kata atau bahkan langkah dan tindakan nyata untuk menyelesaikan persoalan demi tercapainya sebuah tujuan yang kita kehendaki. Dalam kesempatan lain kita juga meminta kebijakan (policy) kepada pemerintah atau aparatur negara dengan maksud dan tujuan yang mungkin sama setidaknya dari segi tujuan yaitu agar kepentingan atau keinginan kita bisa direalisasikan. Sebelum memahami implementasi kebijakan, alangkah baiknya untuk kita pahami terlebih dahulu defenisi atau konsep mengenai kebijakan.

Yang pertama menurut Fredrick (Islamy, 2004:17) yang mengatakan, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Lain pula yang dikatan Charles O. Jones, (1996) bahwa kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit. Defenisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decesion making, yaitu ketika pemerintah membuat suatu keputusan untuk suatu tindakan tertentu. Klasifikasi ini juga dapat didefinisikan sebagai intervensi negara dengan rakyatnya ketika terdapat efek dari akibat suatu program yang dibuat oleh pemerintah yang diterapkan dalam masyarakat.

Sama halnya dengan pendapat Charles O. Jones, (1996). Easton dalam Papilaya J (2020). Kebijakan public sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah. Dari defenisis Easton, maka kebijakan public merupakan proses pengambilan keputusan (decision making). Berdasarkan defenisinya sebuah kebijakan public akan efisien ketika berada dalam ranah pemerintah. Artinya, kekuasaan negara dalam kebijakan public ini sangat besar.

Aderson dalam Papilaya J (2020) Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

- 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- 2) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah
- 3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
- 4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- 5) Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan

memaksa.

Sedangkan Suharto (2005:78) menjelaskan bahwa ada tahapan-tahapan yang terdapat dalam merumuskan kebijakan publik. Tahapan tersebut diantaranya identifikasi, implementasi, dan evaluasi:

1. Tahap Identifikasi

- a. Identifikasi masalah dan kebutuhan Tahapan pertama perumusan kebijakan sosial adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi
- b. Analisis masalah dan kebutuhan Yaitu mengolah, memilah, dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi.
- c. Penginformasian rencana kegiatan.
- d. Perumusan tujuan kebijakan.
- e. Pemilihan model kebijakan.
- f. Penentuan indikator sosial.
- g. Membangun dukungan dan legitimasi publik.

2. Tahap Implementasi

- a. Perumusan rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama dirumuskan kedalam strategi dan pilihan tindakan beserta pedoman peraturan pelaksana.
- b. Perancangan dan Implementasi Program Kegiatan utama pada tahap ini adalah mengoperasionalkan kebijakan ke dalam usulan-usulan program atau proyek sosial untuk dilaksanakan atau

diterapkan kepada sasaran program.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dan Tahap Lanjut Evaluasi dilakukan baik dalam proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauh mana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan.

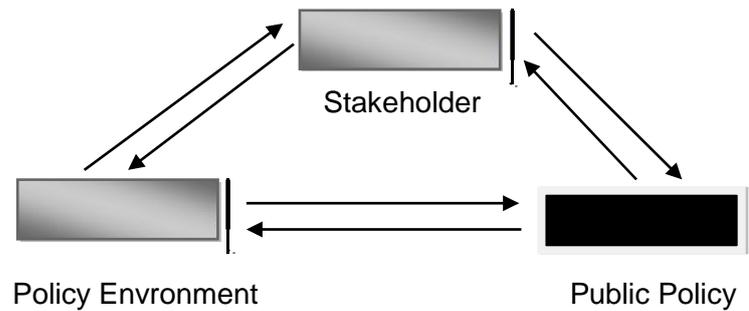
Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa perumusan dalam kebijakan publik dilaksanakan dalam 3 tiga tahap. Pertama, identifikasi permasalahan yang ada pada masyarakat ataupun yang dirasakan oleh masyarakat. serta mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi oleh masyarakat. Kedua, tahapan implementasi dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Dan ketiga, perlunya evaluasi guna mengukur sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan kepada masyarakat.

Kebijakan publik itu sendiri merupakan tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang sengaja dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah demi menyelesaikan persoalan yang terjadi dimasyarakat. Kebijakan ini juga tidak berdiri sendiri melainkan hasil keputusan dari konsensus yang dilakukan oleh pejabat publik guna mencari suatu gagasan yang nantinya akan menghasilkan suatu program untuk dilaksanakan di masyarakat. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan sistem kehidupan nasional yang berada dalam kondisi yang berubah dari waktu ke waktu, ada saat-saat potensi konflik dapat diredam dengan upaya penciptaan kesatuan bentuk dalam segala aspek

kehidupan nasional, dan ada saat-saat di mana konflik harus dikembangkan dalam alam demokratisasi guna pemberdayaan yang diharapkan. Hal itu akan berbeda-beda pula dalam setiap konteks kehidupan, seperti konteks politik, administrasi negara dan pemerintah daerah.

Kebijakan pada dasarnya adalah isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan pelaku kebijakan yang disebut pula sebagai stakeholder. Adapun yang dimaksudkan dengan lingkungan adalah keadaan sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi, pertahanan, dan keamanan, kehidupan lokal, nasional, regional, dan internasional. Kebijakan memiliki sebuah sistem yang saling berhubungan satu sama lain. Sistem tersebut memiliki komponen yang dapat merumuskan maupun menggerakkan. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya pengaruh dari komponen kebijakan itu sendiri.

Sistem kebijakan dalam konteks teori dapat dijadikan sebagai teori di dalam melakukan pengkajian atas kegiatan yang berlangsung dalam proses kebijakan pada setiap tahapan. Tahapan tersebutlah yang menjadi komponen dalam melaksanakan kebijakan publik seperti Stakeholder, lingkungan, dan kebijakan publik. Menurut Dye dalam Ali dan Alam (2016:39), suatu sistem kebijakan dapatlah diperlihatkan dalam pola sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar II. 1 Tiga elemen sistem kebijakan

(Sumber: Ali, Alam, 2016:39)

Ketiga sub sistem ini akan saling berinteraksi dalam satu kesatuan sistem tindakan. sistem stakeholder atau para pelaku kebijakan berinteraksi dengan lingkungan kebijakan (policy environment) dan dengan kebijakan publik yang diperlakukan (public policy). Interaksi berlangsung secara timbal balik dalam pengertian para stakeholder yang mempengaruhi lingkungan dan sebaliknya lingkungan akan mempengaruhi para pelaku kebijakan. Artinya para pelaku kebijakan terhadap lingkungan berupaya mempengaruhi, mengendalikan, merencanakan, mengatur, dan bisa mungkin memaksakan kehendaknya. Sebaliknya lingkungan kebijakan akan mempengaruhi pemikiran para pelaku kebijakan dan bisa mungkin akan dapat menentukan dan dapat memaksakan kehendaknya terhadap para pelaku kebijakan. Lingkungan kebijakan dapat berupa manusia dalam berbagai statusnya seperti para administrator, para pemerintahan dalam berbagai eselon, para publik dalam berbagai peran sebagai kelompok sasaran (target group), dapat berupa alam seperti lingkungan alamiah, geografis, dan aspek alam lainnya.

Dari beberapa pengetahuan yang telah dijelaskan oleh beberapa pakar kebijakan publik diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan publik lebih menitikberatkan pada

masalah publik (masyarakat) dan permasalahan lainnya. Keputusan-keputusan dalam kebijakan publik berupaya untuk mensejahterakan masyarakat.

II.1.2 Implementasi Kebijakan

Pada dasarnya pengertian implementasi kebijakan bukan hanya terkait dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin birokrasi, melainkan pada masalah aspek perwujudan kebijakan serta dalam kondisi bagaimana kebijakan tersebut dibuat, siapa yang membuat, akibat dari kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut setelah diimplementasikan.

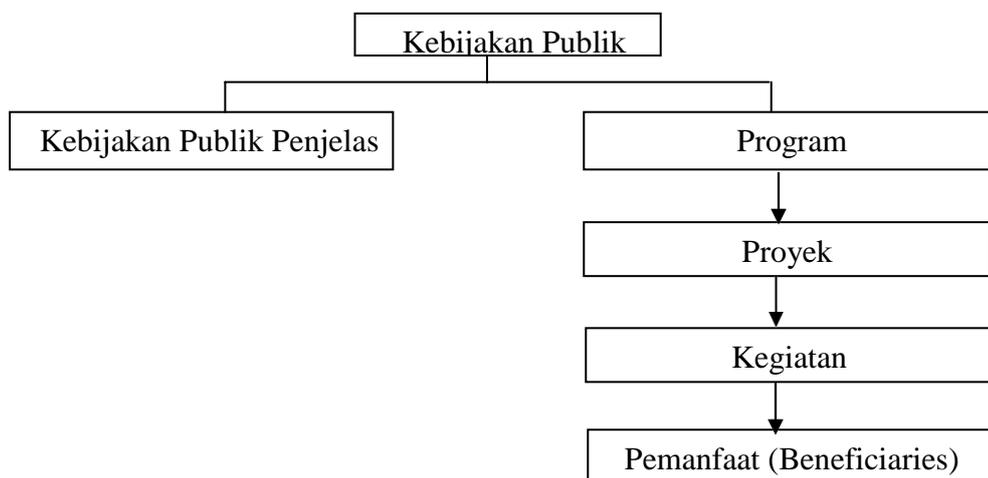
Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah biasanya berbentuk sebuah program, yang kemudian program tersebut dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Tahapan implementasi kebijakan dapat diartikan pula sebagai tindakan nyata dan konkrit yang dilakukan oleh pemerintah hasil dari rumusan yang telah dibuat dalam tahapan formulas. Dalam prakteknya di lapangan, implementasi kebijakan bisa saja mempengaruhi para objek yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan. Sehingga harapan dari pengaruh tersebut adalah dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat terutama menyangkut masalah kesejahteraan.

Studi mengenai implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Setelah suatu kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya

adalah bagaimana agar kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat tercapai tujuannya. Penjelasan mengenai studi implementasi menurut Jeknis dalam Parsons (2008:463) adalah studi perubahan. Bagaimana perubahan terjadi, sebagaimana memungkinkan perubahan bisa dimunculkan. Juga merupakan studi tentang mikro struktur dari kehidupan politik, bagaimana organisasi diluar dan didalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain, apa motivasi mereka bertindak seperti itu dan apa motivasi lain yang membuat mereka bertindak secara berbeda. Menurut Meter dan Horn dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Sedangkan Nugroho (2012:675) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II. 2 sekuensi implementasi kebijakan

(Sumber: Nugroho, 2012,675)

Proses implementasi kebijakan seperti pada gambar di atas menjelaskan bahwa kebijakan publik dioperasionalkan dalam bentuk program. Kemudian program tersebut diturunkan menjadi proyek yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan (Nugroho, 2012:680). Kegiatan tersebut ditujukan kepada pemanfaatan program, yang mana pemanfaatan program tersebut adalah masyarakat. Pada akhirnya kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa pengertian dari implementasi kebijakan pada dasarnya berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Tindakan tersebut berasal dari kelompok pemerintah maupun swasta yang memiliki kemampuan untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau baik bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yakni: tercapai atau

tidaknya tujuan-tujuan yang ingin dicapai (Agustino, 2008:139) pendapat tersebut tidak jauh berbeda seperti yang diungkapkan oleh Grindle dalam Agustino (2008:139) sebagai berikut:

“keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan kedua apakah tujuan program tersebut tercapa”.

Jika suatu kebijakan tepat atau tidak dapat mengurangi masalah maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Menurut Sabatier dalam Parsons (2008:487) terdapat enam syarat yang mencukupi dan harus ada untuk implementasi yang efektif, yaitu:

1. Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar evaluasi legal dan sumber daya.
2. Teori kausal yang memadai, dan memastikan agar kebijakan itu mengandung teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan.
3. Struktur implementasi yang disusun legal untuk membantu pihak-pihak yang mengimplementasikan kebijakan dengan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.
4. Para pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang menggunakan kebijakan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan.
5. Dukungan dari kelompok kepentingan dan “penguasa” di legislatif dan eksekutif.
6. Perubahan dalam kondisi sosio-ekonomis yang tidak melemahkan

dukungan kelompok dan penguasa atau tidak meruntuhkan teori kausal yang mendasari kebijakan.

Hakikat dari implementasi adalah bagaimana rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam praktiknya implementasi kebijakan menitikberatkan pada permasalahan yang begitu kompleks, bahkan tak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan (Agustino, 2008:138).

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu,:

- a. Adanya tujuan sasaran kebijakan.
- b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan
- c. Adanya hasil kegiatan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

II.1.3 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kegiatan yang sifatnya interaktif maka tidak bisa terlepas dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam implementasinya. Implementasi kebijakan memiliki kesamaan makna yakni bahwa implementasi suatu kebijakan publik selalu berada dalam ruang lingkup organisasi dan tidak berada pada ruang yang vacuum, memiliki sejumlah sumber daya seperti aktor atau pelaksana kebijakan, tugas dan fungsi, jalur komunikasi,

hubungan hierarki, serta anggaran dana. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan atau program secara sempurna tidaklah sesederhana yang dibayangkan akan tetapi masih dihadapkan pada berbagai kesukaran- kesukaran seperti kesukaran teknis, perilaku kelompok sasaran, kejelasan alokasi sumber daya, koordinasi, kondisi ekonomi, politik dan sosial. Kesukaran tersebut sekaligus merupakan unsur penghambat yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dan akibatnya program tidak terlaksana atau mungkin gagal.

Wahab (2001:62) mengemukakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: Pertama, dari pemrakarsa kebijakan/ pembuat kebijakan, yaitu usaha- usaha yang dilakukan oleh para pejabat atasan untuk mendapatkan kepatuhan dari pejabat di tingkat lebih rendah dalam mengubah perilaku masyarakat atau kelompok sasaran. Kedua, pejabat-pejabat dilapangan dalam upaya menanggulangi gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya yang disebabkan oleh usaha- usaha dari pejabat di luar instansinya dan Ketiga, kelompok sasaran (target group) yaitu pihak yang akan menikmati hasil dari suatu program (beneficiaries), sejauh mana pelayanan jasa yang telah diberikan dapat mengubah pola hidupnya, dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka.

Sejauh mana kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan kebijakan oleh pelaksana kebijakan merupakan instrumen penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Keberadaan sumber daya di sini adalah untuk mendukung dan menerjemahkan konteks

kebijakan tersebut ke dalam kegiatan-kegiatan organisasi.

Hoogerwerf dalam Sjoraida, D. F. (2015) mengemukakan bahwa untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan terdapat tiga unsur penting, yaitu:

- 1) Program aksi
- 2) Target group atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran
- 3) Unsur pelaksana

Proses implementasi kebijakan ditentukan oleh rencana sebesar 20%, implementasi adalah 60% sisanya ditentukan oleh bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Menurut Nugroho (2012) selain itu, ancaman utama dalam hal ini adalah konsisten dalam proses implementasinya. Sehingga dibutuhkannya model-model implementasi kebijakan. Dalam rangka menjalankan implementasi kebijakan publik, maka diperlukan model implementasi yang dapat digunakan untuk melihat sejauhmana implementasi berjalan. Ada beberapa model yang dikembangkan oleh para pakar kebijakan publik, yakni:

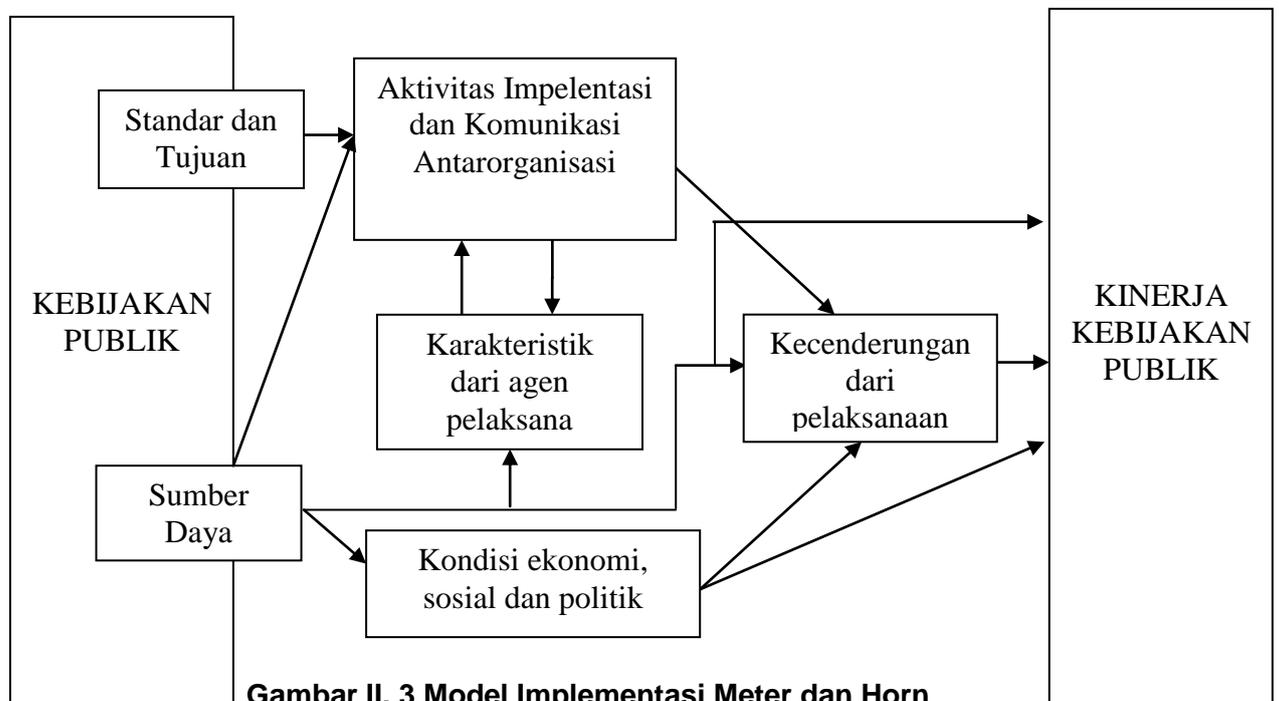
1. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Model ini merupakan model implementasi yang paling klasik. Penggunaan model tersebut yang dirumuskan oleh Meter dan Horn disebut dengan A Model of The Policy Implementation. Artinya dalam proses implementasi, sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang ada secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang

berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Dikemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakansanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah varabel-variabel yang saling berkaitan (Agustino, 2008:142). Beberapa variabel yang dimasukan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.
- b. Sumber daya.
- c. Karakteristik Agen Pelaksana.
- d. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana.
- e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.
- f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.



Gambar II. 3 Model Implementasi Meter dan Horn

(Sumber: Agustino, 2008:144)

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Model Mazmanian dan Sabatier adalah model yang disusun atas dasar proses implementasi kebijaksanaan. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut A Framework For Policy Implementation Analysis. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi (Agustino, 2008:145).

Variabel yang dimaksud dalam tahapan implementasi kebijakan adalah tiga variabel bebas yang dapat berpengaruh, yakni mudah atau tidak mudahnya masalah dikendalikan, kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi, dan variabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi. Adapun yang menjadi indikator dari variabel mudah atau tidak mudahnya masalah kebijakan adalah terdiri dari:

- a. Kesukaran-kesukaran teknis keragaman perilaku kelompok sasaran.
- b. Presentase kelompok sasaran dibandingkan jumlah penduduk.
- c. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.

Sedangkan pada variabel kemampuan kebijakan, indikatornya dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Kejelasan dan konsisten tujuan.
- b. Digunakannya teori kasual yang memadai.

- c. Ketetapan alokasi sumber dana.
- d. Keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana.
- e. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana.
- f. Rekrutmen pejabat pelaksana.
- g. Akses formal pihak luar.

Kemudian variabel di luar kebijakan indikatornya adalah:

- a. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi.
- b. Dukungan publik.
- c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok.
- d. Dukungan dari pejabat atasan.
- e. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

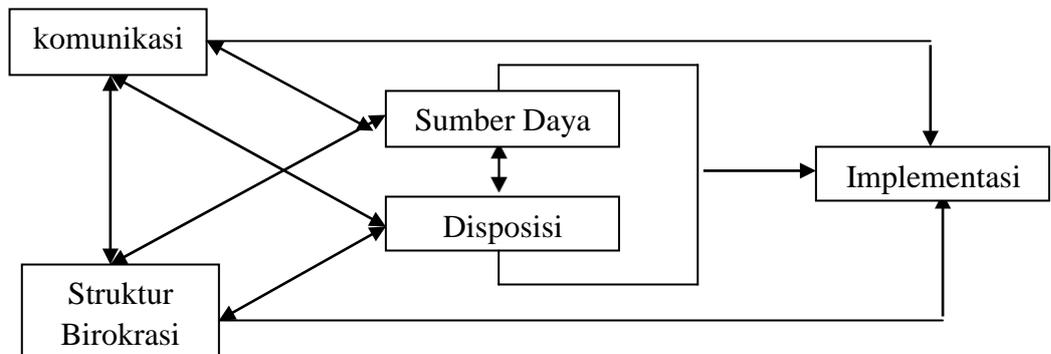
3. Model George C. Edward III

Model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan Direct and Impact on Implementation dalam buku Winarno (2007:144), ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi, yaitu:

- a. Komunikasi.
- b. Sumberdaya.
- c. Disposisi.
- d. Struktur Birokrasi.

Gambar II. 4 Model and Indirect of Implementation

(Sumber: Winarno, 2007:144)



Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari komunikasi, sumber daya politik yang tersedia dan pelaksanaan implementasi kebijakan. Di dalam model implementasi ini, ada empat isu pokok yang harus diperhatikan agar implementasi kebijakan berjalan efektif, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Informasi dalam implementasi kebijakan

mempunyai dua bentuk, yaitu, pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Tujuan dan sasaran tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumber Daya

Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), anggaran yang memadai, peralatan/fasilitas sesuai yang dibutuhkan dan kewenangan yang cukup serta dengan informasi yang jelas maka pengambilan keputusan akan baik, guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya, untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud manusia,

yakni kompetensi implemntor, sumber anggaran/finansial, sumber peralatan/ saran dan prasarana.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implemntor, seperti komitmen dan kejujuran. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Edward III berpendapat bahwa: jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dua karakteristik atau dimensi menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur

birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar Operating Procedure (SOP) dan melaksanakan Fragmentasi SOP adalah suatu kegiatan rutin yang mungkin para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

4. Model Charles O'Jones

Menurut Jones (1996:296), dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan publik diperlukan tiga pilar penilaian agar implementasi dapat berjalan dengan baik, yaitu:

- a. Organisasi
- b. Interpretasi
- c. Penerapan

Organisasi berkenaan dengan struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Interpretasi berkenaan dengan orang-orang yang di dalam organisasi yang bertanggung jawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Begitupula dengan pelaksanaannya, apakah telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Penerapan berkenaan dengan peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.

5. Model menurut Hogwood dan Gunn

Model yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn (dalam Ali, Alam, 2016:109) menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan kebijaksanaan negara secara sempurna diperlukan beberapa syarat seperti:

- a. Hal yang akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan seumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.

- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

II.1.4 Program

1. Pengertian Program

Menurut United Nation yang dikutip oleh Zauhar (1993:2) menjelaskan bahwa:

“Program is taken to mean a from of organized social activity with a specific objective, limited in space and time. It often consist of an inter related group of projects and usually limited to one or more an going organization and activities (program diartikan suatu bentuk kegiatan social yang diselenggarakan dengan tujuan tertentu, terbatas pada ruang waktu. Dan biasanya terdiri dari kelompok yang saling terkait proyek dan biasanya terbatas pada satu atau lebih pengorganisasian dan kegiatan yang saling berjalan)”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa program adalah suatu aktivitas yang telah terorganisasi dalam tempat dan jangka waktu yang telah ditentukan, hal ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan tolak ukur keberhasilan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada menurut Zauhar (1993:2) mengatakan bahwa dalam suatu program akan selalu memiliki tujuan, agar tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka suatu program harus memiliki ciri sebagai berikut:

1. Tujuan dirumuskan secara jelas
2. Penentuan dan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dana tau proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program

4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan dari program tersebut
5. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan tidak berdiri sendiri
6. Berbagai upaya dibidang manajemen termasuk penyediaan tenaga pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

2. Tahapan-tahapan Implementasi Program

Terdapat beberapa tahapan dalam implementasi program yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai dengan efektif. Dalam implementasi program harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu agar arah dan tujuannya dapat tercapai dengan baik. Zauhar (1993:4) dalam penelitian Suci Widya Yunita (2017:39) membagi perencanaan menjadi beberapa tahapan berikut ini:

- a. Tahapan awal dalam perencanaan implementai program dengan melakukan konseptualisasi ide. Ide yang telah terkonsep melalui suatu proses dan kemudian bisa disebut dengan pra studi kelayakan. Kegunaan pra studi kelayakan tersebut adalah untuk mengetahui bahwa program dan proyek yang diusulkan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan.
- b. Tahapa kedua adalah dengan melakukan studi kelayakan terhadap program perlu mengalami suatu studi kelayakan dimana tujuan dari studi kelayakan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana konsep ide itu, penting dan logis untuk

dilaksanakan yang dapat dinilai dari efisiensi tenaga, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaannya.

c. Tahapan selanjutnya adalah dengan melakukan desain. dalam tahapan ini dilakukan perincian sebuah program tersebut. Tahap desain ini, suatu program harus memenuhi persyaratan antara lain teknis, ekonomis, finansial, sosial dan politik. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi maka tahap selanjutnya dalam perencanaan program adalah persetujuan. Dalam tahap persetujuan ini ditentukan bahwa program yang direncanakan tersebut layak atau tidak untuk dijadikan sebuah prioritas. Kelayakan dan cara menentukan prioritas suatu program didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut (Zauhar, 1993:6-11):

- Perbandingan nilai teknis
- Perbandingan tingkat kemanfaatan yang dihasilkan bagi kelompok sasaran strategis
- Perbandingan tingkat kemampuan suatu program atau proyek melayani daerah strategis
- Masuk tidaknya proyek dalam sektor strategis
- Menjadi bagian/tidak suatu proyek dari kegiatan proyek terpadu
- Tingkat urgensi proyek
- Analisa tujuan

d. Tahap akhir dalam perencanaan adalah tahap persiapan pelaksanaan semua hal yang berhubungan dengan proses

implementasi suatu program perlu diperhitungkan. Seperti dalam hal sumber daya manusia yaitu kepegawaiannya. Organisasi, peralatan, perlengkapan, pendanaan dan semua yang terkait dengan program tersebut.

Menurut Zauhar (1993:10) keberhasilan program sangat tergantung pada kerjasama dengan organisasi/instansi terkait dan juga dipengaruhi oleh keteladanan dengan organisasi pemimpin program. Selain itu pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi. Pelaksanaan suatu implementasi program perlu dilakukan monitoring agar suatu program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Zauhar (1993:11) bahwa:

“monitoring sebagai perangkat kegiatan yang dilakukan untuk mengikuti, mengamati dan melacak jalannya pelaksanaan program dan proyek pembangunan dengan menggunakan sistem pelaporan dan tujuan langsung ke lokasi agar memperoleh data dan informasi yang jelas serta menghimpun masalah yang ada untuk dijadikan alternatif pemecahan sebagai input penyempurnaan”.

Dalam implementasi program, hal-hal yang perlu dimonitoring antara lain:

- a. Tujuan yang ingin dimonitoring
- b. Tujuan fungsional meliputi hal-hal yang berkaitan dengan sumbangan atau dampak yang dihasilkan program bagi terciptanya tujuan
- c. Keluaran atau output merupakan hasil akhir yang diperoleh dengan adanya program
- d. Input yakni segala sumber baik manusia, mesin, dana dan metode dalam rangka pencapaian tujuan

- e. Indikator yang diperlukan sebagai pengukuran tingkat keberhasilan

Setelah dilakukan proses monitoring, tahap selanjutnya dalam implementasi program adalah evaluasi, Zauhar (1993:16) mengartikan evaluasi sebagai proses pengukuran atau pengenalan yang berusaha untuk menentukan mengapa kejadian dalam pelaksanaan tingkat keluaran belum atau tercapai. Selanjutnya Zauhar menjelaskan tujuan pokok evaluasi adalah status akhir proyek yang akan menjadi landasan untuk meningkatkan kebijaksanaan tentang proyek atau program pembangunan berikutnya. Dalam artian bahwa, evaluasi akan dijadikan sebagai acuan dan juga bahan rujukan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam rangka untuk memperbaiki implementasi sebuah program tersebut.

II.1.5 Defenisi Rumah

Dalam artian umum, rumah adalah bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Rumah bisa menjadi tempat tinggal manusia maupun hewan, namun tempat tinggal yang khusus bagi hewan biasa disebut sangkar, sarang, atau kandang. Sedangkan dalam artian khusus rumah, mengacu pada konsep-konsep sosial kemasyarakatan yang terjalin di dalam bangunan tempat tinggal seperti keluarga, tempat bertumbuh, makan, tidur, beraktivitas, dll. (wikipedia, 2012).

Rumah merupakan suatu bangunan, tempat manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Disamping itu rumah juga merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat.

Jadi setiap perumahan memiliki sistem nilai yang berlaku bagi warganya. Sistem nilai tersebut berbeda antara satu perumahan dengan perumahan yang lain, tergantung pada daerah ataupun keadaan masyarakat setempat. Sarwono dalam Rully (2014)

Adapun definisi rumah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman adalah sebagai berikut:

1. Perumahan dan kawasan permukiman adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
4. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih satu satuan permukiman.
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas

lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

6. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendaanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Dalam kehidupan sehari-hari, orang biasanya berada diluar rumah untuk bekerja, bersekolah atau melakukan aktifitas lain. Aktifitas yang paling sering dilakukan di dalam rumah adalah beristirahat dan tidur. Selebihnya rumah berfungsi sebagai tempat beraktifitas antara anggota keluarga atau teman, baik di dalam maupun di luar rumah. Tidak hanya itu, rumah juga memiliki fungsi untuk tempat menikmati kehidupan yang nyaman untuk berkumpul bersama keluarga. Agar fungsi rumah sebagai pusat pembinaan bisa tercapai, setiap orang harus menempati rumah yang layak huni. Hunian yang layak harus mampu menopang aktifitas kehidupan sehari-hari secara normal. Pandangan masyarakat tentang rumah layak huni berbeda-beda. Acuan layak suatu hunian biasanya ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan dan tingkat kebutuhan.

Kelayakan suatu hunian menurut UN Universal Declaration of Human Rights dalam Nurasrizal dalam penelitian Adi Fajar Nugraha (2014) adalah

sebagai berikut:

1. Pelayanan dasar dan infrastruktur: Sebuah rumah tempat tinggal harus memiliki fasilitas yang memberikan kesehatan, keamanan,kenyamanan dan dukungan seperti air minum, bahan bakar untuk memasak, memanaskan, penerangan, fasilitas sanitasi, tempat pembuangan sampah, tempat penyimpanan dan pelayanan untuk kondisi darurat.
2. Keterjangkauan: Biaya yang dibutuhkan untuk tempat tinggal yang layak harus terjangkau agar tidak mengurangi kemampuan sebuah rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Dapat ditinggali: Sebuah tempat tinggal harus mampu melindungi penghuninya dari udara dingin, panas, hujan atau ancaman terhadap kesehatan lainnya, serta ruang yang berkecukupan bagi penghuninya.
4. Aksesibilitas: Setiap orang berhak untuk memiliki perumahan yang layak dan kelompok marjinal juga harus memiliki akses terhadap tempat tinggal, yang memprioritaskan hak mereka dalam pengalokasian lahan ataupun perencanaan guna lahan.
5. Lokasi: Sebuah rumah tinggal harus terdapat di lokasi yang memiliki akses terhadap berbagai pilihan tempat kerja, pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat penitipan anak dan fasilitas sosial lainnya. Hal ini berlaku di kota dan desa. Sebuah rumah tinggal juga harus tidak dibangun dekat daerah yang terpolusi ataupun sumber polusi.
6. Mencerminkan budaya: Dalam membangun area perumahan, harus dipastikan bahwa nilai-nilai budaya yang dimiliki penghuninya tercermin di dalamnya, namun tetap menggunakan fasilitas-fasilitas

modern.

Adapun tingkat kebutuhan manusia terhadap hunian menurut Maslow dalam Nurasrizal (2010:29) dalam penelitian Adi Fajar Nugraha 2014) yaitu sebagai berikut:

1. Survival Needs

Tingkat kebutuhan yang paling dasar dimana hunian merupakan sarana untuk menunjang keselamatan hidup manusia.

2. Safety and Security Need

Hunian merupakan sarana perlindungan untuk keselamatan anggota badan dan hak milik.

3. Affiliation Needs

Hunian disini berperan sebagai identitas seorang untuk diakui dalam golongan masyarakat.

4. Esteem Needs

Hunian merupakan sarana untuk mendapatkan pengakuan atas jati dirinya dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Rumah tidak lagi sebagai kebutuhan primer tetapi sudah menjadi kebutuhan lux.

5. Cognitive and Aesthetic Needs

Hunian tidak saja merupakan sarana peningkatan kebanggaan dan harga diri, tetapi juga dapat dinikmati keindahannya.

Sebagai bangunan, rumah berbentuk ruangan yang dibatasi oleh dinding dan atap. Rumah memiliki jalan masuk berupa pintu dengan tambahan jendela. Lantai rumah biasanya berupa tanah, ubin, babut, keramik, atau bahan material lainnya. Rumah bergaya modern biasanya memiliki unsur-unsur ini. Ruangan di dalamnya terbagi menjadi beberapa ruangan yang

berfungsi secara spesifik, seperti; kamar tidur, kamar mandi, WC, ruang makan, dapur, ruang keluarga, ruang tamu, garasi, gudang, teras dan pekarangan. Dengan adanya unsur-unsur diatas rumah yang layak huni dapat terpenuhi dan membuat manusia yang tinggal di dalamnya menjadi bahagia dan sejahtera.

Rumah merupakan sebuah bangunan, tempat manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Disamping itu rumah juga merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi pada saat seorang individu diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Jadi setiap perumahan memiliki sistem nilai yang berlaku bagi warganya. Sistem nilai tersebut berbeda antara satu perumahan dengan perumahan yang lain, tergantung pada daerah ataupun keadaan masyarakat setempat.

II.1.6 Deskripsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaanya dilaksanakan oleh pemerintah”. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M2016 yang juga mengamanatkan pemerintah untuk memberi kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR). Dalam rangkai mewujudkan rumah yang layak huni bagi MBR, yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas umum sehingga mejadi rumah sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan, diperlukan dukungan pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan BPS.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bantuan pemerintah berupa stimulan bagi MBR untuk meningkatkan keswadayaannya dalam pembangunan (bangunan baru) atau peningkatan kualitas rumah beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). BSPS dapat berbentuk uang maupun barang. BSPS dalam bentuk uang diberikan kepada penerima perseorangan guna membeli bahan bangunan dalam rangka pembangunan baru (PB) atau peningkatan kualitas (PK). Sedangkan BSPS dalam bentuk barang dapat berupa bahan bangunan untuk rumah, rumah, atau bahan bangunan untuk PSU.

Kegiatan pemberian BSPS telah dilaksanakan oleh KemenPUPR sejak 2015 dan masih berlanjut sampai dengan saat ini (2020). Program ini menjadi tanggung jawab Direktorat Perumahan Swadaya, Direktorat Jenderal Penyediaan perumahan, KemenPUPR. Dasar hukum dan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan program ini, antara lain.

1. UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah oada Kementrian/Lembaga Negara.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Adapun kriteria rumah tidak layak huni yang dapat dibantu melalui Program BSPS adalah rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial dengan kondisi sebagai berikut:

1. Struktur atap yang dapat membahayakan penghuni
2. Rangkah rumah atau dinding yang tidak layak serta lantai yang masih tanah
3. Ada juga aspek kesehatan yang belum memadai seperti pencahayaan dan sirkulasi udara yang buruk
4. Dari sisi utilitas, seperti tidak memiliki saran MCK dan tempat pembuangan sampah.

Penerima Manfaat:

Penerima manfaat BSPS adalah MBR yang didefinisikan dalam pasal 1 Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2016 sebagai masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Penerima BSPS dapat perseorangan maupun kelompok penerima BPS. Perseorangan dalam BPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. WNI yang sudah berkeluarga.
2. Memiliki atau menguasai tanah,
3. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni.
4. Belum pernah memperoleh BPS dari pemerintah pusat.
5. Berpenghasilan paling banyak senilai UMR Provinsi setempat.
6. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya.
7. Bersedia membentuk kelompok (paling banyak 20 orang).

Sementara itu, kelompok penerima BPS yang mengajukan pembangunan PSU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menyelesaikan PB dan PK tepat waktu dengan kualitas baik
2. Beranggotakan paling sedikit 15 penerima BSPS
3. Bersedia menyelesaikan pembangunan PSU sesuai kesepakatan
4. Bersedia memelihara PSU yang telah dibangun
5. Bersedia mengikuti ketentuan BSPS

Untuk lebih meningkatkan kualitas program BSPS, telah diterbitkan keputusan Menteri PUPR No. 158 tahun 2019 yang menaikkan besaran nilai BSPS. Kenaikan dana BSPS untuk dua kategori yakni Peningkatan Kualitas Ruma Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Rumah Baru Swadaya (PBRs). Untuk PKRS dibagi dua kategori yakni di Provinsi sebelumnya Rp. 15 juta menjadi 17,5 juta terdiri dari komponen bahan bangunan Rp 15 juta dan upah kerja Rp 2,5 juta dan PKRS. Khusus pulau-pulau kecil dan pengunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi Rp 35 juta terdiri komponen bahan bangunan Rp 30 juta dan upah kerja Rp 5 juta. Sementara untuk PBRs dari semula Rp juta menjadi Rp 35 juta terdiri dari komponen bahan bangunan Rp 30 juta dan upah kerja Rp 5 juta.

Dalam program ini pemerintah memang tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, namun berupa bahan bangunan. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk kelompok untuk memperbaiki atau membangun rumah secara gotong royong sehingga bisa tumbuhnya kembali rasa kesetiakawanan antara masyarakat.

II.1.7 Penelitian Terdahulu

Temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam sebuah penelitian. Salah satu data pendukung yang

menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) karena peneliti menganggap program ini tidak jauh beda dari Program yang akan ditelitinya yaitu Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu berupa tesis dan jurnal yang pernah peneliti baca diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Adi Fajar Nugraha pada Tahun 2014, dengan judul penelitian Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kota Serang. Hasil temuan pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa proses Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kota Serang belum berjalan dengan baik. Dikarenakan dalam aspek organisasi, belum sepenuhnya keterlibatan dari pihak-pihak terkait dengan Program RS-RTLH menjadi pelaksana, seperti aparat Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat. Kemampuan TKSK dalam melakukan pendampingan kepada penerima bantuan mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan hanya ada 1 TKSK dalam 1 kecamatan untuk melakukan pendampingan kepada penerima bantuan. Sehingga kesulitan untuk menjangkau ke seluruh wilayah Kecamatan dalam melakukan pendampingan kepada penerima bantuan.

Dan masih ada dari pelaksana yang pemahamannya terbatas mengenai Program RS-RTLH. Seperti ketidaktahuannya terhadap siapa saja yang bertanggung. Kinerja dari Dinas Sosial Kota Serang belum berjalan optimal.

Hal ini dikarenakan Dinas Sosial tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Walikota Serang Nomor 16 tahun 2012, bahwa tugas Dinas Sosial adalah melakukan pendataan, dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Namun, ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Dinas Sosial. Kemudian kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program RS-RTLH. Dan adanya pemotongan keuntungan untuk pihak ketiga sebagai penyedia barang dalam jumlah nominal uang. Sosialisasi juga belum berjalan optimal, karena belum sepenuhnya masyarakat mengetahui soal bantuan ini. Dan dalam proses penyeleksian calon penerima bantuan dan pencairan dan pun tidak memiliki kapasitas waktu yang jelas. Pihak ketiga sebagai penyedia barang tidak transparan kepada penerima bantuan. Ditemukannya Praktik KKN dalam pelaksanaan Program ini, dimana ada masyarakat yang mengikuti program tersebut tidak melalui seleksi, melainkan titipan dari Anggota Dewan Kepada Dinas Sosial, maupun dari orang terdekat di Dinas Sosial Kota Serang. Serta pemahaman dan pengetahuan dari para penerima bantuan program RS-RTLH yang masih terbatas.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah (2017) dengan judul penelitian Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak layak Huni (RS-RTLH) Di Kabupaten Lombok Utara (Studi pada Kelurahan Sukanda, Kecamatan Bayan, Lombok Utara). Hasil temuan dari penelitian ini dijelaskan bahwa proses Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kabupaten Lombok Utara khususnya di Desa Sukanda ini berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini bisa dilihat dari dalam Aspek Organisasinya

dimana didalam aspek organisasi, SDM dan pelaksana program saling berakaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Serta dilihat dari dalam Aspek Interpretasinya program ini semua pihak yang terlibat saling bekerjasama dalam mensukseskan program ini, dengan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang. Dan juga dapat dilihat dari dalam Aspek Penerapannya dimana program ini suda berjalan sesuai dengan ketentuan, dimana pelaksanaanya suda tepat sasaran.

Akan tetapi di dalam pelaksanaanya ditemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan program RS-RTLH di Kabupaten Lombok Utara, salah satunya yaitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan adanya ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaanya. Hal ini di pengaruhi karena waktu yang telah ditentukan tidak cukup untuk membangun rumah sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Utara.

Dari kedua hasil penelitian terdahulu diatas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Adapun persamaan penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah sama-sama menggunakan teori Implementasi, dan memfokuskan penelitian pada Rumah yang Tidak layak Huni. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah terletak pada nama Programnya, dimana penelitian ini menggunakan nama program BSPS sedangkan penelitian terdahulu menggunakan nama Program RS-RTLH. Dan juga terdapat perbedaan di lokasi penelitian. Dimana lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Malimbong Kecamatan Messawa

Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat, sedangkan lokasi penelitian dari hasil penelitian terdahulu di Kota Serang dan Kabupaten Lombok Utara (Studi pada Kelurahan Sukanda, Kecamatan Bayan, Lombok Utara).

II.2 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur pemikiran peneliti dalam dan sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan dari implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ada di Desa Malimbong, Kecamatan Messawa Kabupaten Mamasa, maka dalam penelitian ini dibuatkanlah kerangka berfikir. Sehingga dengan adanya kerangka berfikir ini, baik peneliti maupun pembaca dari penelitian ini mudah memahami dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari penelitian.

Penelitian ini diawali dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah yaitu:

1. Proses pencairan dan penyaluran dana tidak memiliki kapasitas waktu yang jelas
2. Proses pengadaan barang yang tidak merata sehingga menimbulkan ketidakmerataan pembagunan.
3. Masih terkendalanya pelaksanaan program BSPS yang kurang sesuai dengan petunjuk teknis teknis pelaksanaan
4. Sosialisasi Program BSPS belum berjalan optimal

Permasalahan-permasalahan tersebut akan dikaji dengan dengan pijakan teori model Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan Direct and Impact on Implementation dalam buku Winarno (2007:144) yaitu ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi yaitu:

Komunikasi: dalam penelitian, peneliti akan mengkaji siapa yang bertanggung jawab dalam program ini, serta apakah telah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan para pelaksana mengenai kejelasan suatu ukuran dan tujuan kebijakan, apakah sudah konsisten dan seragam antara ukuran dan tujuan dalam program ini atau dengan kata lain apakah sudah dilaksanakan sosialisasi peraturan. dan peneliti juga akan mengetahui penyaluran (transmisi), dan bahkan akan mengetahui apakah semua orang yang terlibat didalamnya sudah konsisten dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Serta apakah hubungan kerja baik antar investor dan antar pelaksana kebijakan berjalan dengan baik.

Sumber Daya, dalam penelitian, peneliti akan mengkaji bagaimana ketersediaan Sumber Daya dalam program ini, dimana sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia (jumlah staf), keahlian dari para pelaksana, anggaran (sumber dana/pembiayaan) serta informasi dan kewenangan mengenai fasilitas (sarana dan prasarana). Dalam hal ini sumber daya yang berkenaan dengan kecakapan pelaksanaan kebijakan publik.

Disposisi, dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana tingkat kejujuran dari para implementor dalam melaksanakan tugasnya, baik itu dari sikap pelaksana atau implementor sampai kepada bagaimana dukungan dari para pelaksana terhadap kesuksesan pelaksanaan program ini.

Struktur Birokrasi, dalam tahap ini, peneliti akan membahas badan pelaksana suatu kebijakan atau struktur organisasi pelaksanaan program ini. Serta mencari tau bagaimana sinergitas, kerjasama dan lain sebagainya dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Empat model variabel di atas dianggap cocok untuk menjawab permasalahan-permasalahan terhadap pelaksanaan atau implementasi dari program Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan teori menurut Edward III ini dianggap pas oleh peneliti untuk mengukur berhasil atau tidaknya Implementasi Program BSPS di Desa Malimbong, serta diharapkan dengan adanya hal itu pelaksanaan BSPS di Desa Malimbong dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari program BSPS tercapai. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 2.5 di bawah ini:

Gambar II. 5 Kerangka Pikir

